



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI SUMBA TENGAH



WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH

WAIBAKUL 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat diselesaikan.

Penerapan dan Pencapaian SPM di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024 yang dapat dilaporkan meliputi 6 (enam) bidang urusan yaitu urusan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal, dan diharapkan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat sehingga pada gilirannya tercipta kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyadari bahwa upaya untuk Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada semua bidang urusan masih mengalami kekurangan dan hambatan yang berdampak pada kurang maksimalnya Penerapan Standar Pelayanan Minimal itu sendiri. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran baik dari aspek perencanaan, monitoring dan evaluasi dari semua pihak terutama Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib dengan pelayanan dasar sangat dibutuhkan.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan urusan bidang pelayanan dasar di daerah ini.

Waibakul, 21 Maret 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kebijakan Umum Daerah	4
D. Arah Kebijakan.....	5
BAB II PENERAPAN SPM.....	9
BAB III PENCAPAIAN SPM	69
1. Urusan Pendidikan	69
2. Urusan Kesehatan	72
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	82
6. Urusan Sosial	86
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	90
1. Urusan Pendidikan.....	90
2. Urusan Kesehatan	92
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat....	95
6. Urusan Sosial	96
BAB IV PENUTUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dalam implementasinya dibagi kedalam beberapa urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Lebih lanjut dijabarkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria, namun lebih dari pada itu bahwa SPM secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.



Pedoman penyusunan SPM tahun 2024 yang dilaporkan pada tahun 2025 sesuai dengan bidang urusan telah merujuk pada peraturan teknis dari kementerian terkait, yang terdiri dari:

1. Bidang pendidikan, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bidang sosial, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Standar teknis SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Perangkat Daerah penyelenggara SPM di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1
Perangkat daerah Penyelenggara SPM
Kabupaten Sumba Tengah

No	Perangkat Daerah (urusan pemerintahan)	Pemangku SPM
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	SPM Bidang Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan	SPM Bidang Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	SPM Bidang Trantibumlinmas (Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Damkar)
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SPM Bidang Sosial
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SPM Bidang Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebencanaan)

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan



10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Berbagai isu nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan perikanan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan.

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tertuang di dalam RPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024-2026 yakni:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUMBA TENGAH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Sumba Tengah yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing dengan menjamin pencapaian hasil pembangunan yang berkeadilan;
- 3) Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- 4) Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung oleh sistem politik yang demokratis;
- 5) Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum;
- 6) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang;
- 7) Mewujudkan peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat secara lebih baik dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial.



D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini akan difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dengan demikian arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah ditetapkan untuk menjamin adanya kesinambungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026.

Fokus pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 difokuskan pada 3 sektor utama, pertanian (termasuk peternakan), pariwisata dan energi bar terbarukan. Sektor–sektor lain tetap dibangun dan ditingkatkan sebagai pendukung untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan minimal.

Pembangunan yang difokuskan pada 3 (tiga) sector tersebut dilaksanakan untuk menjawab persoalan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 yaitu:

1) Sumber daya manusia, sosial dan kemasyarakatan, 2) Ekonomi masyarakat, 3) sarana prasarana, infastruktur termasuk konektivitas dan lingkungan, 4) pemerintahan dan kelembagaan.

Secara rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada table berikut ini:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
EKONOMI KEMASYARAKATAN				
	SEKTOR PARIWISATA			
	Penetapan kawasan pariwisata yang akan dikembangkan			
	Pembangunan dan Penataan Destinasi Wisata, di Kabupaten Sumba Tengah			
	Pengembangan pemasaran destinasi wisata			
	Penetapan exploring national park dan konsep pariwisata agrotourism			
	Pengembangan kelembagaan pariwisata			
	Pengembangan industri pariwisata melalui pengembangan ekraf, khususnya fashion, industri perhotelan dan homestay, rumah makan dan restoran, biro perjalanan wisata			
	Bantuan / akses permodalan untuk industri pariwisata			
	UMKM, PERDAGANGAN & INVESTASI			
	Pengembangan Investasi melalui peningkatan infrastruktur dan suprastruktur investasi			
	Penguatan iklim pertumbuhan UMKM melalui promosi penggunaan produk lokal, meningkatkan permintaan produk UMKM, meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM			
	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung UMKM			
	Melindungi tenaga kerja di sektor informal/UMKM			
BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan harga yang terjangkau			
	Peningkatan potensi sektor perdagangan dan logistik daerah			
	Peningkatan ketrampilan usaha dan kewirausahaan bagi tenaga kerja usia produktif			
	PERTANIAN			

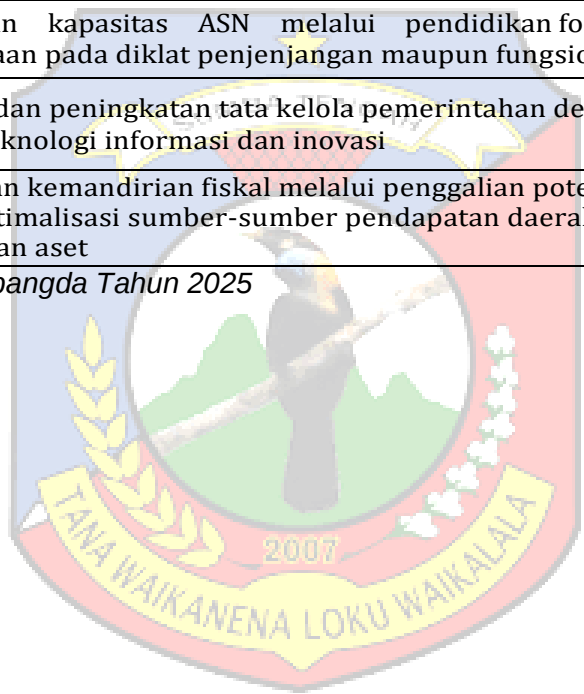


	Pembangunan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan melalui pengelolaan komoditas strategis dan unggulan, meningkatkan kesejahteraan petani dengan fasilitasi akses pembiayaan (kredit) ke perbankan/lembaga bukan bank, Intensifikasi dan optimalisasi lahan dengan meningkatkan produksi lahan basah dan melakukan alih fungsi lahan kering menjadi basah			
	Meningkatkan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri pasca panen			
	Meningkatkan kesejahteraan petani melalui tanaman pekarangan			
	Pendampingan masyarakat yang intensif untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang terintegrasi dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya lahan			
	Membangun Peternakan melalui pengembangan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pariwisata, meningkatkan pemberdayaan peternak, dan meningkatkan pemasaran produk ternak			
SUMBER DAYA MANUSIA, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN				
	Peningkatan SDM dan kelembagaan melalui pengembangan Speningkatan pendidikan formal yang berkelanjutan, peningkatan pendidikan dan pelatihan non-formal yang tersertifikasi, peningkatan kesehatan masyarakat			
	Pengembangan SDM yang akan memenuhi kebutuhan tiga sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata dan energi baru terbarukan			
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya lokal, pengembangan Integrasi budaya lokal melalui mapping culture yang terintegrasi dengan sektor unggulan, pengentasan kemiskinan dan kondisi tertinggal melalui pembukaan akses sosial dan infrastruktur, peningkatan kerja sama antar stakeholders guna menudukung kesejahteraan masyarakat, dan pencegahan konflik dan kekerasan di masyarakat			
SARANA PRASARANA, INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN ENERGI				
	ENERGI			
BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
	Penyediaan akses energi untuk masyarakat Sumba Tengah melalui revitalisasi unit pembangkit listrik EBT yang rusak dan tidak beroperasi, penyediaan EBT berbasis komunitas			
	Pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata dan food estate,revitalisasi unit pembangkit listrik EBT yang rusak dan tidak beroperasi khususnya yang mendukung kawasan strategis pariwisata dan food estate			



	KONEKTIVITAS			
	Peningkatan konektivitas wilayah melalui pengembangan jaringan jalan dan penataan jaringan transportasi umum			
	INFRASTRUKTUR DASAR DAN FASILITAS UMUM			
	Peningkatan dan perluasan cakupan pelayanan infrastruktur dasar melalui pengembangan drainase berwawasan lingkungan, peningkatan cadangan air melalui konservasi air, pengelolaan sampah dan limbah domestik dan pengelolaan sampah dan limbah non domestic			
	Penyediaan fasilitas sanitasi untuk masyarakat prasejahtera, pemerataan suplai air bersih kepada masyarakat			
	Penyediaan pelayanan yang mendukung ketertiban dan keamanan umum			
	PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN			
	Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan formal, keikutsertaan pada diklat penjenjangan maupun fungsional			
	Menataan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi dan inovasi			
	Peningkatan kemandirian fiskal melalui penggalian potensi daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan pemanfaatan aset			

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2025



BAB II

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Tahapan penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tahapan penerapan SPM melalui Perangkat Daerah penyelenggara SPM, namun karena berbagai kendala yang dihadapi khususnya keterbatasan anggaran, Perangkat Daerah pengampu SPM belum seluruhnya melakukan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Pengumpulan Data

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI											
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH											
No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BAKB/SPS/TPA)	2136	3652							2136	3652
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			9775	10301	4912	5709	14687	16010		



FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH							
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRIST EK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	7		1	2	-	-
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)			3	21	0,425	0,345

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR					
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	55,365	49,89	5,095	51,885



FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI									
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH									
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	-	-	-	-	-	-	-	-



FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)							
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH							
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	72	109	23,58%	21,85%	1	149

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR					
KABUPATEN/KOTA: SUMBA TENGAH					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	74,035	68,275	63,4875	60,895



- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Sampai dengan tahun anggaran 2024, urusan pendidikan belum melaksanakan tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Sampai dengan tahun anggaran 2024, urusan pendidikan belum melaksanakan tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Sampai dengan tahun anggaran 2024, urusan pendidikan belum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.



B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1) Pengumpulan Data

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANA N KESEHATA N BALITA	PELAYANA N KESEHATA N PADA USIA PENDIDI KAN DASAR	PELAYANA N KESEHATA N PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANA N KESEHATA N PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATA N PENDERITA HIPERT ENSI	PELAYANA N KESEHATA N PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANA N KESEHATA N ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)	PELAYANA N KESEHATA N ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS	PELAYANA N KESEHATA N ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Katikutana	Umbu Riri	316	316	301	1.346	2.514	7.971	1.039	1.960	44	11	257	292
2	Katikutana Selatan	Malinjak	358	358	341	1.525	2.847	9.028	1.177	2.220	50	12	291	309
3	Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	303	303	289	1.293	2.413	7.651	997	1.882	43	11	247	232
4		Lawonda	234	234	223	997	1.861	5.900	769	1.451	33	8	190	187
5	Umbu Ratu Nggay Tengah	Maradesa	129	129	122	548	1.023	3.243	423	798	18	4	105	117
6	Umbu Ratu Nggay	Lendiwacu	124	124	118	529	988	3.134	408	771	17	4	101	117
7		Pahar	76	76	72	324	605	1.918	250	472	11	3	62	51
8		Tanambanas	78	78	75	334	623	1.975	257	486	11	3	64	73
9	Mamboro	Mananga	348	348	332	1.484	2.771	8.786	1.145	2.161	49	12	283	333
10		Weeluri	124	124	118	526	983	3.116	406	766	17	4	100	110



**FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	KATIKUTANA	PUSKESMAS	★ 1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1
				Dokter Gigi	0
				Perawat	16
				Bidan	13
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	4
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	2
				Nutrisionis	2
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	2
				Ahli teknologi laboratorium medik	1



		KLINIK PRATAMA	1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1
				Dokter Gigi	0
				Perawat	3
				Bidan	1
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	0
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	0
				Nutrisi	0
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	2
				Ahli teknologi laboratorium medik	1



2	KATIKUTANA SELATAN	PUSKESMAS	1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	2
				Dokter Gigi	1
				Perawat	35
				Bidan	16
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	2
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	4
				Nutrisionis	4
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	2
				Ahli teknologi laboratorium medik	2



3	UMBU RATU NGGAY BARAT	PUSKESMAS	2	Dokter dan/atau dokter layanan primer	4
				Dokter Gigi	0
				Perawat	54
				Bidan	29
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	8
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	2
				Nutrisionis	6
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	4
				Ahli teknologi laboratorium medik	5



		RUMAH SAKIT	1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	8
				Dokter Gigi	0
				Perawat	100
				Bidan	29
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	4
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	3
				Nutrisionis	8
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	14
				Ahli teknologi laboratorium medik	15



4	UMBU RATU NGGAY TENGAH	PUSKESMAS	1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1
				Dokter Gigi	0
				Perawat	21
				Bidan	18
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	7
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	1
				Nutrisionis	2
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	1
				Ahli teknologi laboratorium medik	2



5	UMBU RATU NGGAY	PUSKESMAS	3	Dokter dan/atau dokter layanan primer	3
				Dokter Gigi	0
				Perawat	42
				Bidan	24
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	11
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	3
				Nutrisionis	8
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	5
				Ahli teknologi laboratorium medik	5



6	MAMBORO	PUSKESMAS	2	Dokter dan/atau dokter layanan primer	2
				Dokter Gigi	2
				Perawat	34
				Bidan	28
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)	9
				Tenaga Sanitasi Lingkungan	2
				Nutrisionis	4
				Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	3
				Ahli teknologi laboratorium medik	5



2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH								
NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	VAKSIN TETANUS DIFTERI	1.760					
		TABLET TAMBAH DARAH	381.780					
		ALAT DETEKSI RESIKO IBU HAMIL/TEST KEHAMILAN	2.121					
		ALAT DETEKSI RESIKO IBU HAMIL PEMERIKSAAN HB	2.121					
		DARAH	2.121					
		URIN	318					
		SKRINING TRIPLE ELIMINASI DENGAN TES CEPAT: HEPATITIS B	2.121					
		SKRINING TRIPLE ELIMINASI DENGAN TES CEPAT: HIV	2.121					
		SKRINING TRIPLE ELIMINASI DENGAN TES CEPAT: SIFILIS	2.121					
		KARTU IBU/REKAM MEDIS IBU	2.121					
		BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)	2.121					
		MEDIA KIE	2.121					
		GEL USG	167					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	FORMULIR PATOGRAF	2.090					
		KARTU IBU (DISESUAIKAN DENGAN IBU HAMIL)	2.121					
		HAMIL)	2.121					
		MEDIA KIE	2.090					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	VAKSIN HEPATITIS B DOSIS TUNGGAL (PREFILLED SYRINGE)	1.991					
		VITAMIN K1 INJEKSI	1.991					
		SALEP/TETES MATA ANTIBIOTIK	1.991					
		FORMULIR BAYI BARU LAHIR	1.991					
		FORMULIR MANAJEMEN TERPADU BAYI MUDA (MTBM)	5.973					
		HAMIL)	2.121					
		MEDIA KIE	1.991					



4	Pelayanan Kesehatan Balita	KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN (KPSP) ATAU INSTRUMEN STANDAR LAIN YANG BERLAKU (SASARAN: SESUAI KEBUTUHAN)	5.368					
		FORMULIR DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG (SASARAN: SESUAI KEBUTUHAN)	3.003					
		BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)	7.423					
		VITAMIN A BIRU (SASARAN: BALITA 6-11 BULAN)	1.597					
		VITAMIN A MERAH (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN)	2.870					
		VAKSIN IMUNISASI DASAR (BCG, POLIO TETES, IPV/POLIO SUNTIK, DPT-HB-Hib, CAMPAK RUBELA) (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN)	3.324					
		VAKSIN IMUNISASI LANJUTAN ANAK BAWAH 2 TAHUN (BADUTA) (DPT-HB-Hib, CAMPAK RUBELA) (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN)	2.496					
		JARUM SUNTIK DAN BHP (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN)	8.112					
		PERALATAN ANAFILAKTIK (PENGOBATAN BILA TERJADI SYOK ANAFILAKTIK AKIBAT PENYUNTIKAN (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN YANG MENGALAMI SYOK))	1.220					
		FORMULA TERAPI GIZI BURUK (SASARAN: BALITA 12-59 BULAN GIZI BURUK)	306					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	FORM PENCATATAN/BUKU RAPOR KESEHATANKU (SASARAN: PESERTA DIDIK DI SEKOLAH)	4.882					
		FORM PENCATATAN/BUKU PEMANTAUAN KESEHATAN (SASARAN: ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR DI LUAR SEKOLAH)	856					
		KUESIONER SKRINING KESEHATAN	13.781					
		FORMULIR REKAPITULASI HASIL PELAYANAN KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA DI DALAM SEKOLAH (SASARAN: PESERTA DIDIK DI SEKOLAH)	9.250					
		FORMULIR REKAPITULASI HASIL PELAYANAN KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA DI LUAR SEKOLAH (SASARAN: ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR DI LUAR SEKOLAH)	1.816					
		TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI KELAS 7 - 9 DAN USIA 12 - 17 TAHUN DI LUAR SEKOLAH (SASARAN PEREMPUAN USIA PENDIDIKAN DASAR)	27.491					
		ALAT PEMERIKSAAN HB (SASARAN: SESUAI KEBUTUHAN)	2.736					
		STRIP HB (SASARAN: REMAJA PUTRI KELAS 7)	1.301					
		MEDIA PROMOSI KESEHATAN (SASARAN: SESUAI KEBUTUHAN)	298					
		VAKSIN CAMPAK RUBELA, DT, Td, UNTUK PELAKSANAAN BIAS (SASARAN: SISWA KELAS 1 SD, 2 SD, 5 SD, DAN ANAK DI LUAR SEKOLAH DENGAN USIA SETARA)	1.154					



6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PEDOMAN DAN MEDIA KIE (1. PEDOMAN PELAKSANAAN DETEKSI DINI PENYAKIT PADA KELOMPOK USIA PRODUKTIF, 2. MEDIA TENTANG PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, 3. PEDOMAN/MEDIA KIE PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN/PUS DAN KB)	27					
		ALAT SKRINING (JUMLAH ALAT SKRINING)	11.055					
		BMHP SKRINING	43.704					
		ALAT PEMERIKSAAN IVA (JUMLAH ALAT)	12.551					
		ALAT PEMERIKSAAN HB (JUMLAH ALAT)	1.409					
		ALAT PELAYANAN KB (JUMLAH ALAT)	4.877					
		FORMULIR/MATRIK PELAPORAN SIPTM (SASARAN: FASKES)	9					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	ALAT PEMERIKSAAN DETEKSI DINI (ALAT UKUR BERAT BADAN, ALAT UKUT TINGGI BADAN, ALAT UKUR LINGKAR PERUT DAN LINGKAR LENGAN ATAS, TENSIMETER)	73					
		GLUKOMETER (ALAT PEMERIKSAAN GULA DARAH)	5.318					
		ALAT PEMERIKSAAN KOLESTEROL	4.151					
		STRIP UJI PEMERIKSAAN GULA DARAH DAN KOLESTEROL, LANCET, KAPAS ALKOHOL	6.871					
		INSTRUMEN SKRINING LANSIA SEDERHANA DAN INSTRUMEN AKTIFITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI	6.454					
		BUKU KESEHATAN LANSIA ATAU APLIKASI PENCATATAN TERKAIT LAINNYA	6.871					
		MEDIA KIE (SESUAI KEBUTUHAN)	1.482					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PEDOMAN PENGENDALIAN HIPERTENSI DAN KIE (MINIMAL 2)	286					
		TENSIMETER (SESUAI KEBUTUHAN)	70					
		FORM PENCATATAN DAN PELAPORAN APLIKASI SEHAT INDONESIA (ASIK)	4.718					
		MEDIA PROMOSI KESEHATAN (SESUAI KEBUTUHAN)	4.237					



9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	FOTOMETER (JUMLAH ALAT)	19					
		GLUKOMETER (JUMLAH ALAT)	43					
		BMHP GULA DARAH (REAGEN GLUKOSA ATAU STRIP GULA DARAH, KAPAS ALKOHOL, LANCET)	253					
		FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN APLIKASI SIPTM, ASIK, SIMPUS (SESUAI KEBUTUHAN)	2.696					
		PEDOMAN DAN MEDIA KIE (MINIMAL 3: PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER, MEDIA KIE TENTANG DM, MEDIA KIE TENTANG PTM)	37					
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	BUKU PEDOMAN PENGKOLONGAN DAN DIAGNOSIS GANGGUAN JIWA (PPDGJ III) ATAU BUKU PEDOMAN PENGKOLONGAN DAN DIAGNOSIS GANGGUAN JIWA TERBARU (MINIMAL 1)	9					
		PENYEDIAAN PSIKOFARMAKA (SESUAI KEBUTUHAN)	36					
		PENYEDIAAN FORMULIR SKRINING KESEHATAN JIWA DAN/ATAU MELALUI APLIKASI (SESUAI KEBUTUHAN)	146					
		PENYEDIAAN FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN MELALUI SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SESUAI KEBUTUHAN)	287					
		MEDIA KIE (SESUAI KEBUTUHAN)	302					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	MEDIA KIE (LEAFLET, LEMBAR BALIK, POSTER, BANNER) (SESUAI KEBUTUHAN)	1.163					
		REAGEN ZIEHL NEELSEN (ZN) TB	1.709					
		MASKER BEDAH DAN MASKER (N95) (SESUAI SASARAN DITAMBAH JUMLAH TENAGA YANG MENANGANI)	1.490					
		POT DAHAK, KACA SLIDE, BAHAN HABIS PAKAI (OIL EMERSI, ETHER ALKOHOL, LAMPU SPIRTUS/BUNSEN, RAK PENERING) (SESUAI KEBUTUHAN)	937					
		KATRID TES CEPAT MOLEKULER	1.740					
		FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN (SESUAI KEBUTUHAN)	863					
		PEDOMAN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SESUAI KEBUTUHAN)	237					
		TUBERKULIN	317					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	MEDIA KIE BERUPA LEMBAR BALIK, LEAFLET, POSTER, BANNER (SESUAI KEBUTUHAN)	100					
		TES CEPAT HIV (RDT) PERTAMA (SESUAI KEBUTUHAN)	8.808					
		BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (HANDSCOEN, ALKOHOL SWAB, PLESTER, LANCET/JARUM STERIL, JARUM+SPUIT YANG SESUAI/VACUTAINER DAN JARUM SESUAI	491					
		REKAM MEDIS BERISI NOMOR REKAM MEDIS, NOMOR FASYANKES PELAKSANA, NOMOR KTP/NIK	2.907					



FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	GINEKOLOGI	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	GINEKOLOGI	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DOKTER/DOKTER SPESIALIS ANAK	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	10	10	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		KADER KESEHATAN	10	10	-	



4	Pelayanan Kesehatan Balita	DOKTER	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		GURU PAUD	10	10	-	
		KADER KESEHATAN	10	10	-	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DOKTER/DOKTER GIGI	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	10	10	-	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DOKTER	18	13	5	
		PERAWAT	74	74	-	
		BIDAN	64	63	1	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		DOKTER TERLATIH IVA	-		-	
		BIDAN TERLATIH IVA	-		-	
		KADER KESEHATAN	10	10	-	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DOKTER	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	10	10	-	



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DOKTER	18	13	5	
		BIDAN	64	63	1	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	10	10	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	10	10	-	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DOKTER	18	13	5	
		PERAWAT	74	74	-	
		BIDAN	64	63	1	
		TENAGA GIZI	18	18	-	
		TENAGA ATLM	10	10	-	
		TENAGA NON KESEHATAN TERLATIH	10			
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	DOKTER	18	13	5	
		TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN DI BIDANG KESEHATAN JIWA	-		-	
		TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	-		-	
		TENAGA LAIN YANG TERLATIH DI BIDANG KESEHATAN JIWA	-		-	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	DOKTER/DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM, DOKTER SPESIALIS PARU	18	13	5	
		PERAWAT	74	74	-	
		TENAGA KEFARMASIAN	10	10	-	
		TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	10	10	-	
		TENAGA ATLM	10	10	-	
		RADIOGRAFER	-		-	
		KADER KESEHATAN	10	10	-	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DOKTER/DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM/DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	18	13	5	
		PERAWAT	74	74	-	
		BIDAN	64	63	1	
		TENAGA ATLM	10	10	-	
		TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	10	10	-	
		TENAGA NON KESEHATAN TERLATIH ATAU MEMPUNYAI KUALIFIKASI TERTENTU	10		10	



3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
KABUPATEN: SUMBA TENGAH																	
NO	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10	
1	1				Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar												
	1	02			Urusan pemerintahan bidang kesehatan												
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator UKM dan UKP yang	50	85	27.297.201.291	90	28.607.739.925	95	29.909.392.091			95	29.909.392.091
																	Dinas Kesehatan



FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN: SUMBA TENGAH

N O.	KODE)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator UKM dan UKP yang meningkat														
	1	02	02	2.02		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Desa Mendapat Pelayanan UKM dan UKP														
	1	02	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	505.601.000	100	530.881.050	100	557.425.103	100	585.296.358					100	585.296.358	Dinas Kesehatan
	1	02	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	355.000.000	100	372.750.000	100	391.387.500	100	410.956.875					100	410.956.875	Dinas Kesehatan
	1	02	02	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	145.590.000	100	152.869.500	100	160.512.975	100	168.538.624					100	168.538.624	Dinas Kesehatan



1	02	02	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	383.613.000	100	402.793.650	100	422.933.333	100	444.079.999					100	444.079.999	Dinas Kesehatan
1	02	02	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	102.117.000	100	107.222.850	100	112.583.993	100	118.213.192					100	118.213.192	Dinas Kesehatan
1	02	02	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Penduduk Usia Produktif mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	130.818.000	100	137.358.900	100	144.226.845	100	151.438.187					100	151.438.187	Dinas Kesehatan
1	02	02	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Penduduk Usia Lanjut mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	98.255.000	100	103.167.750	100	108.326.138	100	113.742.444					100	113.742.444	Dinas Kesehatan
1	02	02	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.375					100	17.364.375	Dinas Kesehatan



	1	02	02	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.375					100	17.364.375	Dinas Kesehatan
	1	02	02	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000.000	100	47.250.000	100	49.612.500	100	52.093.125					100	52.093.125	Dinas Kesehatan
	1	02	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga Tuberkulosis mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	223.582.500	100	234.761.625	100	246.499.706	100	258.824.692					100	258.824.692	Dinas Kesehatan
	1	02	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	40.660.000	100	42.693.000	100	44.827.650	100	47.069.033					100	47.069.033	Dinas Kesehatan



4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.090			869.957.000					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.090			750.802.000			DAK, DAU		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.991			350.859.320			DAK, DAU		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	8.906			1.190.786.000			DAK, DAU		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	15.431			464.730.000			DAK, DAU		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	52.722			480.116.000			DAK, DAU		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	6.871			97.600.000			DAK, DAU		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.967			84.528.000			DAK, DAU		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	293			218.280.000			DAK, DAU		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72			41.000.000			DAK, DAU		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1.700			418.850.400			DAK, DAU		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1.557			54.800.000			DAK, DAU		



C. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Pengumpulan Data

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN: SUMBA TENGAH												
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)		BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KATIKUTANA	MATAREDI	MATA AIR	SOTU	MATAREDI	5	5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		DEWA JARA	MATA AIR	WAIPALU	DEWA JARA	10	10	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
	SELATAN	TANA MODU	MATA AIR	LAIGOLI	TANA MODU	7	5	2	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		MALINJAK	MATA AIR	MAMBITUL	MALINJAK	5	5	0		TIDAK BEROPERASI		
		OKA WACU	MATA AIR	WAIPURUNG	OKA WACU	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
	URGB	ANAJIKA	MATA AIR	WAILIANG	ANAJIKA	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		MADERI	MATA AIR	PABOCUCUA	MADERI	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
	URGANTENG	SAMBALILOKU	MATA AIR	PRAIKALAL	SAMBALILOKU	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		WANGGA WAIYENGU	MATA AIR	WAINENDI	WANGGA WAIYENGU	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
	MAMBORO	WENDEWA SELATAN	MATA AIR	WAIBUBUL	WENDEWA SELATAN	2	2	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		CENDANA BARAT	MATA AIR	WAIKANGGURUK	CENDANA BARAT	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		SUSU WENDEWA	MATA AIR	WAIKAPAMBAL	SUSU WENDEWA	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
	URG	TANAMBANAS SELATAN	MATA AIR	LOKUMBORUNG	TANAMBANAS SELATAN	2	2	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
		TANAMBANAS BARAT	MATA AIR	WAIURANG	TANAMBANAS BARAT	1,5	1,5	0	UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI
									UPTD	BEROPERASI	TERPENUHI	TERPENUHI



FORM 3.A.4 KONDISI SPALD
KABUPATEN: SUMBA TENGAH

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPAL Okawacu	SP 1	Beroprasi	katikutana Selatan	Oka Wacu	187,5 M3	20	1,5 M3	5



2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN: SUMBA TENGAH														
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Katikutana	Makata Keri								350		136		
		Kabela Wuntu								147		209		
		Mata Woga								118		288		
		Umbu Riri								142		298		
		Anakalang								750		319		
		Dewa Jara								190		177		
		Mata Redi								205		38		
2	Katikutana Selatan	Tana Modu								377		148		
		Malinjak								313		224		
		Wai Lawa								137		360		
		Dameka								91		332		
		Wai Manu								84		315		
		Manurara								84		246		
		Dasa Elu								387		135		
		Oka Wacu								125		84		
		Konda Maloba								47		173		



3	Umbu Ratu Nggay Barat	Prai Madeta								125		136		
		Pondok								42		256		
		Maderi								236		96		
		Umbu Pabal Selatan								42		160		
		Umbu Jodu								85		150		
		Mata Waikajawi								97		100		
		Anapalu								134		122		
		Daha Elu								135		98		
		Dewa Tana								96		142		
		Anajiaka								178		149		
		Wai Rasa								275		466		
		Umbu Kawolu								142		133		
		Umbu Mamijuk								145		267		
		Umbu Pabal								64		358		
		Umbu Langgang								120		128		
4	Umbu Ratu Nggay Tengah	Wangga Waiyengu								187		91		
		Bolubokat								40		255		
		Bolubokat Barat								40		123		
		Bolubokat Utara										221		
		Maradesa Timur								26		99		
		Maradesa Selatan								20		103		
		Maradesa								40		107		
		Weluk Prai Memang								87		137		
		Sambali Loku								225		104		
		Holur Kambata								87		89		



5	Mamoro	Wendewa Timur								210		170		
		Wendewa Selatan								300		139		
		Wendewa Utara								420		214		
		Wendewa Barat								53		245		
		Cendana										351		
		Wee Luri								89		193		
		Ole Ate								175		168		
		Manu Wolu								197		281		
		Watu Asa								80		119		
		Bondo Sulla								25		240		
		Susu Wendewa								225		119		
		Ole Dewa								110		153		
		Cendana Barat								125		151		
6	Umbu Ratu Nggay	Mbilur Pangadu								80		197		
		Soru								67		211		
		Prai Karoku Jangga								52		207		
		Lenang								98		213		
		Tana Mbanas								193		120		
		Padira Tana								152		151		
		Ngadu Mbolu								47		170		
		Tana Mbanas Selatan								223		78		
		Tana Mbanas Barat								98		40		
		Ngadu Olu								97		120		
		Lenang Selatan								58		210		



FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD
KABUPATEN: SUMBA TENGAH

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	R W	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha) Jumlah Rumah	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDU	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN TERTEKUN	IPALD PERKOTAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	KATIKUTANA	UMBU RIRI			330	Perdesaan	Rawan								112	218							
		MATAREDI			174	Perdesaan	Rawan								59	115							
		MATAWOGA			304	Perdesaan	Rawan								108	196							
		KABELAWUNTU			339	Perdesaan	Rawan								108	231							
		MAKATAKERI			425	Perdesaan	Rawan								145	280							
		ANAKALANG			670	Perdesaan	Rawan								225	445							
		DEWA JARA			328	Perdesaan	Rawan								112	216							
	UMBU RATU NGGAY TENGAH	WANGGA WAIYENGU			192	Perdesaan	Rawan								65	127							
		SAMBALILOKU			257	Perdesaan	Rawan								87	170							
		HOLUR KAMBATA			199	Perdesaan	Rawan								51	148							
		BOLU BOKAT			154	Perdesaan	Rawan								52	102							
		BOLU BOKAT BARAT			145	Perdesaan	Rawan								49	96							
		BOLU BOKAT UTARA			136	Perdesaan	Rawan								46	90							
		MARADESA			128	Perdesaan	Rawan								44	84							
		MARADESA TIMUR			106	Perdesaan	Rawan								19	87							
		MARADESA SELATAN			117	Perdesaan	Rawan								28	89							
		WELUK PRAIMEMANG			211	Perdesaan	Rawan								22	189							



		UMBU LANGANG			151	Perdesaan	Rawan								39	112								
		UMBU PABAL			289	Perdesaan	Rawan								98	191								
		UMBU PABAL SELATAN			129	Perdesaan	Rawan								35	94								
		UMBU JODU			168	Perdesaan	Rawan								32	136								
		UMBU MAMIJUK			355	Perdesaan	Rawan								90	265								
		UMBU KAWOLU			255	Perdesaan	Rawan								87	168								
		WAIKASA			581	Perdesaan	Rawan								198	383								
		ANAJIKA			237	Perdesaan	Rawan								81	156								
		ANAPALLU			187	Perdesaan	Rawan								92	95								
		PRAIMADETA			194	Perdesaan	Rawan								101	93								
		MATA WAIKAJAWI			160	Perdesaan	Rawan								82	78								
		MADERI			254	Perdesaan	Rawan								101	153								
		DAHA ELU			203	Perdesaan	Rawan								69	134								
		DEWA TANA			238	Perdesaan	Rawan								81	157								
		PONDOK			229	Perdesaan	Rawan								78	151								
		SUSU WENDEWA			226	Perdesaan	Rawan								77	149								
		WENDEWA BARAT			201	Perdesaan	Rawan								68	133								
		WENDEWA TIMUR			220	Perdesaan	Rawan								81	139								
		WENDEWA UTARA			554	Perdesaan	Rawan								178	376								
		WENDEWA SELATAN			305	Perdesaan	Rawan								104	201								
		MANUWOLU			225	Perdesaan	Rawan								80	145								
		WATU ASA			224	Perdesaan	Rawan								76	148								
		CENDANA			331	Perdesaan	Rawan								113	218								
		CENDANA BARAT			174	Perdesaan	Rawan								59	115								
		OLE DEWA			217	Perdesaan	Rawan								28	189								
		OLE ATE			277	Perdesaan	Rawan								82	195								
		WEELURI			192	Perdesaan	Rawan								65	127								
		BONDO SULA			206	Perdesaan	Rawan								70	136								



	UMBU RATU NGGAY	MBILUR PANGADU			195	Perdesaan	Rawan								66	129								
		NGADU OLU			155	Perdesaan	Rawan								61	94								
		PADITRATANA			252	Perdesaan	Rawan								134	118								
		PRAIKAROKU JANGGA			216	Perdesaan	Rawan								48	168								
		SORU			280	Perdesaan	Rawan								95	185								
		TANA MBANAS SELATAN			179	Perdesaan	Rawan								23	156								
		TANA MBANAS			228	Perdesaan	Rawan								77	151								
		TANA MBANAS BARAT			123	Perdesaan	Rawan								36	87								
		LENANG			169	Perdesaan	Rawan								57	112								
		LENANG SELATAN			173	Perdesaan	Rawan								19	154								
		NGADU MBOLU			133	Perdesaan	Rawan								59	74								
	KATIKUTANA SELATAN	KONDA MALOBA			138	Perdesaan	Rawan								47	91								
		OKAWACU			159	Perdesaan	Rawan								16	143								
		DASA ELU			491	Perdesaan	Rawan								144	347								
		TANAMODU			414	Perdesaan	Rawan								141	273								
		MALINJAK			398	Perdesaan	Rawan								112	286								
		WAILAWA			401	Perdesaan	Rawan								136	265								
		DAMEKA			243	Perdesaan	Rawan								83	160								
		WAIMANU			270	Perdesaan	Rawan								92	178								
		MANURARA			218	Perdesaan	Rawan								74	144								
					16.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.197	10.835	0	0	0	0	0	0	0	0



3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN: SUMBA TENGAH							
JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
2	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari				Z			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN	RUMAH TANGGA TERLAYANI SR	500 SR	SR	3	15.000.000.000	PUPR
	PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN	RUMAH TANGGA TERLAYANI SR	20 L/S	L/S	3	5.000.000.000	PUPR
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					



FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN: SUMBA TENGAH								
NO	JENS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1		3	4	5	6	7		8
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	16.032	unit	tersebar		PUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	100	Unit			



4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

3.D.3 DATA CAPAIAN						
SPM PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH						
PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI						
No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi		
			Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
			(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)
1	2	3	4	6	7	8
1	Katikutana	Makata Keri	486	350		136
		Kabela Wuntu	356	147		209
		Mata Woga	406	118		288
		Umbu Riri	440	142		298
		Anakalang	1.069	750		319
		Dewa Jara	367	190		177
		Mata Redi	243	205		38
2	Katikutana Selatan	Tana Modu	525	377		148
		Malinjak	537	313		224
		Wai Lawa	497	137		360
		Dameka	423	91		332
		Wai Manu	399	84		315
		Manurara	330	84		246
		Dasa Elu	522	387		135
		Oka Wacu	209	125		84
		Konda Maloba	220	47		173



3	Umbu Ratu Nggay Bara	Prai Madeta	261	125		136
		Pondok	298	42		256
		Maderi	332	236		96
		Umbu Pabal Selatan	202	42		160
		Umbu Jodu	235	85		150
		Mata Waikajawi	197	97		100
		Anapalu	256	134		122
		Daha Elu	233	135		98
		Dewa Tana	238	96		142
		Anajiaka	327	178		149
		Wai Rasa	741	275		466
		Umbu Kawolu	275	142		133
		Umbu Mamijuk	412	145		267
		Umbu Pabal	422	64		358
		Umbu Langgang	248	120		128
4	Umbu Ratu Nggay Tenga	Wangga Waiyengu	278	187		91
		Bolubokat	295	40		255
		Bolubokat Barat	163	40		123
		Bolubokat Utara	221			221
		Maradesa Timur	125	26		99
		Maradesa Selatan	123	20		103
		Maradesa	147	40		107
		Weluk Prai Memang	224	87		137
		Sambali Loku	329	225		104
		Holur Kambata	176	87		89



5	Mamboro	Wendewa Timur	380	210		170
		Wendewa Selatan	439	300		139
		Wendewa Utara	634	420		214
		Wendewa Barat	298	53		245
		Cendana	351			351
		Wee Luri	282	89		193
		Ole Ate	343	175		168
		Manu Wolu	478	197		281
		Watu Asa	199	80		119
		Bondo Sulla	265	25		240
		Susu Wendewa	344	225		119
		Ole Dewa	263	110		153
		Cendana Barat	276	125		151
						0
6	Umbu Ratu Nggay	Mbilur Pangadu	277	80		197
		Soru	278	67		211
		Prai Karoku Jangga	259	52		207
		Lenang	311	98		213
		Tana Mbanas	313	193		120
		Padira Tana	303	152		151
		Ngadu Mbolu	217	47		170
		Tana Mbanas Selatan	301	223		78
		Tana Mbanas Barat	138	98		40
		Ngadu Olu	217	97		120
		Lenang Selatan	268	58		210
Total			21.221	9.389	0	11.832
Persentase Layanan				44,24%	0,00%	55,76%
Capaian SPM				44,24%		



FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN: SUMBA TENGAH

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KATIKUTANA	UMBU RIRI	330	330					218		
		MATAREDI	174	174					115		
		MATAWOGA	304	304					196		
		KABELAWUNTU	339	339					231		
		MAKATAKERI	425	425					280		
		ANAKALANG	670	670					445		
		DEWA JARA	328	328					216		
2	UMBU RATU NGGAY TENGAH	WANGGA WAIYENO	192	192					127		
		SAMBALILOKU	257	257					170		
		HOLUR KAMBATA	199	199					148		
		BOLU BOKAT	154	154					102		
		BOLU BOKAT BARU	145	145					96		
		BOLU BOKAT UTARA	136	136					90		
		MARADESA	128	128					84		
		MARADESA TIMUR	106	106					87		
		MARADESA SELATAN	117	117					89		
		WELUK PRAIMEMA	211	211					189		



3	UMBU RATU NNGAY BARAT	UMBU LANGANG	151	151					112		
		UMBU PABAL	289	289					191		
		UMBU PABAL SELA	129	129					94		
		UMBU JODU	168	168					136		
		UMBU MAMIJUK	355	355					265		
		UMBU KAWOLU	255	255					168		
		WAIRASA	581	581					383		
		ANAJIACA	237	237					156		
		ANAPALLU	187	187					95		
		PRAIMADETA	194	194					93		
		MATA WAIKAJAWI	160	160					78		
		MADERI	254	254					153		
		DAHA ELU	203	203					134		
		DEWA TANA	238	238					157		
		PONDOK	229	229					151		
4	MAMBORO	SUSU WENDEWA	226	226					149		
		WENDEWA BARAT	201	201					133		
		WENDEWA TIMUR	220	220					139		
		WENDEWA UTARA	554	554					376		
		WENDEWA SELATA	305	305					201		
		MANUWOLU	225	225					145		
		WATU ASA	224	224					148		
		CENDANA	331	331					218		
		CENDANA BARAT	174	174					115		
		OLE DEWA	217	217					189		
		OLE ATE	277	277					195		
		WEELURI	192	192					127		
		BONDO SULA	206	206					136		



5	UMBU RATU NGGAY	MBILUR PANGADU	195	195				129		
		NGADU OLU	155	155				94		
		PADITRATANA	252	252				118		
		PRAIKAROKU JANG	216	216				168		
		SORU	280	280				185		
		TANA MBANAS SEL	179	179				156		
		TANA MBANAS	228	228				151		
		TANA MBANAS BA	123	123				87		
		LENANG	169	169				112		
		LENANG SELATAN	173	173				154		
		NGADU MBOLU	133	133				74		
6	KATIKUTANA SELATAN	KONDA MALOBA	138	138				91		
		OKAWACU	159	159				143		
		DASA ELU	491	491				347		
		TANAMODU	414	414				273		
		MALINJAK	398	398				286		
		WAILAWA	401	401				265		
		DAMEKA	243	243				160		
		WAIMANU	270	270				178		
		MANURARA	218	218				144		
		Total *)			16.032	16.032				10.835



D. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sampai dengan tahun anggaran 2024, urusan perumahan rakyat belum melaksanakan 4 tahapan penerapan SPM.

- E. Urusan Bidang Trantibumlinmas
1) Pengumpulan Data
a) Sub Urusan Trantibum

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA							
KABUPATEN SUMBA TENGAH							
NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	
1	RAMBU BABA HATA	5317015012670000	5317010103100000	WAIKAJOBAB	10 December 1967	WAIBAKUL	
2	MARWAN	6472051708860000	5317010103160000	BIMA	17 August 1986	WAIBAKUL	
3	MILA UMBU KADEBU	5317014510800000	5317010204080080	PASUNGA	05 October 1980	WAIBAKUL	
4	KABEKU LAKI LONA	5317010501690000	5317010204080750	PASUNGA	05 January 1969	PASUNGA	
5	U PUDA WALANGARA, S.Sos	5317012908690000	5317010204080790	PASUNGA	29 August 1969	PASUNGA	
6	MIGU PADA RAGA	5317013008670000	5317010204080810	PASUNGA	30 August 1967	WAIBAKUL	
7	MELKIANUS UMBU MADIATA	5317011005830000	5317010204080810	WAIBAKUL	10 May 1983	KAMPUNG BARU	
8	GAUKA SABA KODI	5317011202680000	5317010204080810	ANAKALANG	12 February 1968	KAMPUNG BARU	
9	NUR HIDAYAT	5317010610570000	5317010204080830	BLITAR	06 October 1957	KAMPUNG BARU	
10	SULAIMAN	5317010807650000	5317010310110000	SRAGEN	08 July 1965	KOMP. PASAR INPRES	
11	SEPTIAN HARDIANTO	5312152809890000	5317010704220000	NGANJUK	28 September 1989	WAIBAKUL	
12	DORKAS WALA GOLE	5317016712510000	5317010601160000	WAIKABUBAK	27 December 1951	PASAR INPRES	
13	UMI ALMAIDAH	6202084609610000	5317011409160000	BLITAR	06 September 1961	JLN. KAMPUNG BARU	
14	MARTHEN DJAGA LIMU,SH	5317010603720000	5317011507100000	WAIKABUBAK	06 March 1972	WAIBAKUL	
15	DAMA UMBU JOKA	5317012105730000	5317011704150000	WAIKAJAWI	21 May 1973	WAIKAJAWI	
16	JEMI U. NEKA LOKU LANAK	5317011506900000	5317011903150000	ANAKALANG	15 June 1990	KAMPUNG BARU	
17	JOHANIS UMBU TAGELA	5317010101630000	5317012107100000	WAIKABUBAK	01 January 1963	KAMPUNG BARU	
18	ENINA FITRI MALIWEMU	5317015301720000	5317012302110000	WAIBAKUL	13 January 1972	WAIBAKUL	
19	GIDION IBI DEKI	5317011006840000	5317012703130000	WAIBAKUL	10 June 1984	WAIBAKUL	
20	MUHIDIN	5206050507800000	5317010103160000	PESA	05 July 1980	ANAKALANG	
21	BURHAN	5272030107870100	5317020804150000	BIMA	01 July 1987	PASAR INPRES	
22	SERVIANUS UMBU LORONG	5317010805790000	5317010204080830	KATIKU LOKU	08 May 1979	PASAR INPRES	
23	NOFIATER UMBU NGAILU	5317040611880000	5317012510160000	PASUNGA	06 November 1988	WAIBAKUL	
24	UMBU DJAWA TAKADJADJI	5317010509590000	5317011604100000	PASUNGA	05 September 1959	PASUNGA	
25	MUSLIMIN	3314021211780000	5317012610150000	SRAGEN	12 November 1978	KAMPUNG BARU	



26	ABDURRAHMAN	3175050601680000	5317010704150000	BIMA	06 January 1968	DESA ANAKALANG
27	DAWI NGANA	5317016708590000	5317010204080070	PASUNGA	27 August 1959	PASUNG
28	RAMBU PARI LOKAT	5317014909440000		MADIDI JAWA	09 September 1944	WAIKAJAWI RT : 003 RW : 001
29	STEPANUS S. PEKULIMU	5317012606630000	5317010204080020	ANAKALANG	26 June 1963	PASUNGA
30	DORSIA M. GIRI	5317014310520000	5317010204080020	ROTE	03 October 1952	PASUNGA
31	YOHANA R. EDA RIDJA	5317015711390000		WAIBAKUL	17 November 1939	NGADU RADI
32	BERA KUDU	5317014505630000	5317010204080830	PRAISALINGA	05 May 1963	PASUNGA
33	NIKODEMUS BERNABAS KAUSE			NIKI NIKI	13 March 1978	WAIBAKUL
34	HAMDAN	5204140609880000	5317011501180000	EMPANG	06 September 1988	KAMPUNG BARU
35	MARTEN UMBU KABALU	5317013010780000	5317012609170000	PASUNGA	30 October 1978	PASUNGA
36	ABDUL ARIF	5312151307760000	5312153103084100	PESA	13 June 1976	KAMPUNG BARU
37	STEFANUS UMBU SIWA, S.SOS	5317013012690000	5317011911190000	PASUNGA	30 December 1969	WAIBAKUL
38	CHRISTOFORUS BILI	5317011312600000	5317010103100000	RARA MATA	13 December 1960	PASAR INPRES ANAKALANG
39	AHMAD ZAILANI, SPT	5317010310650000	5317010110100000	PAMETI KARATA	03 October 1965	PASAR IMPRES
40	AYUB ARBAA	5317012611740000	5317010204080000	ANAKALANG	26 November 1974	KAMPUNG BARU
41	YULIUS GAUKA SABAKODI	5317012907750000	5317010204080010	PASUNGA	29 July 1975	PASUNGA
42	ABDULLAH MUHAMAD AHMAD ALGADRI	5317011712810000	5317010204080010	WANO KAKA	17 December 1981	PASUNGA
43	DJAILANI LANDA	5317012705790000	5317010204080020	ANAKALANG	27 May 1979	PASUNGA
44	HADAIDAH MURIJAN	5317013112470000	5317010610100000	WAINGAPU	31 December 1947	ANAKALANG
45	FAHMI MAULANA IDRIS	5317011605500000	5317010204080030	WAINGAPU	16 May 1950	KAMPUNG BARU
46	HAMID BIN AHMAD ALGADRI	5317011610540000	5317010204080120	WAINGAPU	16 October 1954	KAMPUNG BARU
47	IPA KUPANG	5317014107320000	5317010204080390	KATEWEL	01 July 1932	WAIBAKUL
48	BURA HUDA	5317010411690000	5317010204080470	PRAIGAGA	04 November 1969	KAMPUNG BARU
49	ANTONIUS UDA	5317012105610000	5317010204080560	MANGARAI	21 May 1961	KAMPUNG BARU
50	STEPANUS UMBU SEBU IBI DAPA	5317013112750000	5317010204080640	DAMEKA	31 December 1975	WAIKAJAWI
51	UMBU SUNGA PAJUKANG	5317010606670000	5317010204080730	ANAKALANG	06 June 1967	KAMPUNG BARU
52	KADEBU GIGAR	5317013110630000	5317010204080750	PASUNGA	31 October 1963	PASUNGA
53	SARMIN LANDA	5317010805540000	5317010204080750	WAIKABUBAK	08 May 1954	PASUNGA
54	RAMBU LADU DAY	5317014107390010	5317010204080810	MADIDI JAWA	01 July 1939	KAMPUNG BARU
55	HAMID HUSEIN ALGADRI	5317011212630000	5317010204080810	WAIKABUBAK	12 December 1963	KAMPUNG BARU
56	THOMAS WUNU SABA TUDUNG	5317011209650000	5317010204080810	ANAKALANG	12 September 1965	KAMPUNG BARU



FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Kantor Desa	1	BAIK
2	Kantor Pos	1	BAIK
3	Bank BRI	1	BAIK
4	Sekolah	2	BAIK
5	Gereja	1	BAIK
6	Rumah Warga	55	BAIK
7	Kendaraan Warga	70	BAIK

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	1. Pembongkaran Portal		
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	2. Pengembalian fungsi Trotoar		
3	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.			
4	Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/ Orang-Orang Penting.			
5	Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting.			



FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP				
KABUPATEN SUMBA TENGAH				
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	GEDUNG	2	1	1
2	MOBIL	3	3	2
3	MOTOR	7	7	-
4	KOMPUTER	2	2	-
5	LAPTOP	9	5	4
6	LEMARI	8	7	1
7	KURSI	60	57	3
8	MEJA	30	27	3
9	FILING KABINET	2	2	-
10	HT	4	4	-
11	Printer	8	2	6

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)						
KABUPATEN SUMBA TENGAH						
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	25		60	3	1300



FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH					
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	3	1	2	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER KABUPATEN SUMBA TENGAH					
NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	0	0	-	-



FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER					
KABUPATEN SUMBA TENGAH					
NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0



b) Sub Urusan Kebencanaan

Sampai dengan tahun anggaran 2024, sub urusan kebencanaan belum melaksanakan tahapan pengumpulan data.

c) Sub Urusan Kebakaran

Sampai dengan tahun anggaran 2024, sub urusan kebakaran belum melaksanakan tahapan pengumpulan data.

2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

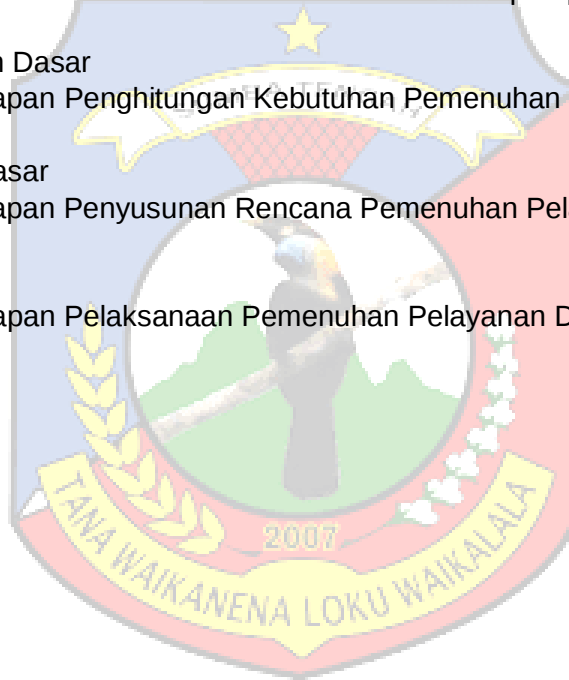
Sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas.

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan tahapan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas.

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan tahapan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas.



F. Urusan Bidang Sosial
1) Pengumpulan Data

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS																		
KABUPATEN: SUMBA TENGAH																		
NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	Tempat	Tanggal Lahir	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS		KONDISI KETRE	LANTRAAN	KET	
														KELUAR	RENTAN	MASIH		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Penyandang Disabilitas																		
1	YOHANIS NGUNJU NGARA	5317043007	L		Padamu	, 30-07-1991	Padamu	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204081730	tinggal dalam kel	kawin	petani	lumpu	keluarga			
2	SELMY KOKU YOWA	5317045904	P		Wangga	, 19-04-2008	wangga	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204081704	tinggal dalam kel	KAWIN	petani	buta	keluarga			
3	MELKIANUS U. YEWA	5317041005	L		Langga Liru,	10-05-1986	langgaliru	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204081737	tinggal dalam kel	kawin	petani	tuli	keluarga			
4	JEKSON U. HUNGA	5317041707	L		Palendi	, 17-07-1991	palendi	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204081641	tinggal dalam kel	belum kawin	petani	bisu tuli	keluarga			
5	YANI NDAMA MIJUK	5317046603	L		Mangacu Api	16/03/1997	Mangacu Ap	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040212140012	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
6	DOMINGGUS KANGUMA NGEDU	5317040107	L		Mangacu Api	26/06/1978	Mangacu	tinggal dikeluarga	orang tua	5317041202160001	tinggal dalam kel			Ayan	keluarga			
7	PAULINA KAHY LEBA	5317040706	L		Mangacu Api	7 /06/2013	Mangacu Ap	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040201140011	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
8	COSMAS G. SARUNG	5317040107	P		Loku	03/11/1962	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317042704150003	tinggal dalam kel			Buta	keluarga			
9	FETRONELA FIGA TAGA	5317040107	L		Loku	1/07/1967	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082986	tinggal dalam kel			Buta	keluarga			
10	YEREMIAS RAGGAS	5317040107	L		Waipanjialu	1 /07/ 1945	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082235	tinggal dalam kel			Tuli	keluarga			
11	NOVELLA DWIPUTRI R. LIKA	5317040107	L		Waipanjialu	1/07/1951	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082240	tinggal dalam kel			Tuli	keluarga			
12	OWEN OCTOVIAN K.DJ. KIRE	5317041103	P		Waipanjialu	11 /03/1989	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082184	tinggal dalam kel			Bisu	keluarga			
13	YANA TONDA MBITU	5317042003	L		Waipanjialu	20/03/1948	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	531704130714004	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
14	ROBINSON U. KARANU	5317044107	P		Waipanjialu	1 /07/1978	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317043011150001	tinggal dalam kel			Gila	keluarga			
15	NDENA PEKA AMAH	5317040107	L		Lumbu Bakul	1 /01 1937	Waipanjialu.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082310	tinggal dalam kel			Tuli	keluarga			



16	KATAUCU YOLI	5317044103	P	Waipanjalalu	20 /08 /1954	Waipanjalalu	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040209182326	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
17	RAMBU TATU RIDJA	5317045004	P	Tana Pahi	10/04/1999	Tana Pahi.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082352	tinggal dalam kel			Bisu	keluarga			
18	YOSEFINA KHE	5317045207	P	Tana Pahi	30 /08/ 1994	Tana Pahi.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082257	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
19	PIDU KOLAK	5317044511	P	Tana Pahi	5 /11/ 1995	Tana Pahi.	tinggal dikeluarga	orang tua	5317041212130002	tinggal dalam kel			Lumpu	keluarga			
20	VICTOR D. WALANGARA	5317045712	PEREMPUAN	PAREWATANA	17/12/1982	DUSUN I	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204080611	tinggal dalam kel			LUMPUH	keluarga			
21	YUNITA TAWURU MAY	5317040110	LAKI-LAKI	LENANG	01/10/1997	DUSUN I	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040602200002	tinggal dalam kel			LUMPUH	keluarga			
22	PUTRA ARJUNA NDATA MAY	5317041801	LAKI-LAKI	LENANG	18/01/2009	DUSUN III	tinggal dikeluarga	orang tua	5317042805150002	tinggal dalam kel			KEJWAAN	keluarga			
23	MADA NGARANG	5317040101	LAKI-LAKI	LENANG	22/06/1999	DUSUN III	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204080508	tinggal dalam kel			LUMPUH	keluarga			
24	MARIA KOKU YOWA	5317044101	PEREMPUAN	LENANG	27/09/2006	DUSUN III	tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204080508	tinggal dalam kel			LUMPUH	keluarga			
25	Risno K, Runga	5317046603	L	Mangacu Api	16/03/1997		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040212140012	tinggal dalam kel			Lumpu				
26	Dena Konda Ratu	5317040107	L	Mangacu Api	26/06/1978		tinggal dikeluarga	orang tua	5317041202160001	tinggal dalam kel			Ayan				
27	Jhendra Arlovesh Dai	5317040706	L	Mangacu Api	7 /06/2013		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040201140011	tinggal dalam kel			Lumpu				
28	Hawu Amah	5317040107	P	Loku	03/11/1962		tinggal dikeluarga	orang tua	5317042704150003	tinggal dalam kel			Buta				
29	Meta Ratu Mara	5317040107	L	Loku	1/07/1967		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082986	tinggal dalam kel			Buta				
30	Agus Giku Laya	5317040107	L	Waipanjalalu	1 /07/ 1945		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082235	tinggal dalam kel			Tuli				



31	Lau mada	5317040107	L	Waipanjialu	1/07/1951		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082240	tinggal dalam kel				Tuli				
32	Apri Ata Jama	5317041103	P	Waipanjialu	11 /03/1989		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082184	tinggal dalam kel				Bisu				
33	Haru Hama Ganggu	5317042003	L	Waipanjialu	20/03/1948		tinggal dikeluarga	orang tua	531704130714004	tinggal dalam kel				Lumpu				
34	Margareta yoi bali	5317044107	P	Waipanjialu	1 /07/1978		tinggal dikeluarga	orang tua	5317043011150001	tinggal dalam kel				Gila				
35	Hiwa Kondang	5317040107	L	Lumbu Bakul	1 /01 1937		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082310	tinggal dalam kel				Tuli				
36	Belu Ataria	5317044103	P	Waipanjialu	20 /08 /1950		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040209182326	tinggal dalam kel				Lumpu				
37	Santi b, kahi	5317045004	P	Tana Pahi	10/04/1999		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082352	tinggal dalam kel				Bisu				
38	Ewan t, may	5317045207	P	Tana Pahi	30 /08/ 1998		tinggal dikeluarga	orang tua	5317040204082257	tinggal dalam kel				Lumpu				
39	Epri b, Meja	5317044511	P	Tana Pahi	5 /11/ 1995		tinggal dikeluarga	orang tua	5317041212130002	tinggal dalam kel				Lumpu				
40	YOAN UMBU TALU PEKULIMU	5317020606	LAKI-LAKI	MADIDIPAL AMEDU	06-06-2000	MANUKAKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083193	tinggal dalam kel				LUMPUH	keluarga			
41	UMBU RUPA	5317021501	LAKI-LAKI	WAIRASA	15-01-1950	WAIMAMON	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083123	tinggal dalam kel				GANGGU AN	keluarga			
42	BANGI HAWU	5317027112	PEREMPUA	LOKUJUN G	31-12-1937	LOKU UJUN	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020203150002	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
43	RAMBU ANARARA	5317025502	PEREMPUA	LAWONDA	15-02-1932	MANUKAKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020408170001	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
44	RAMBU BOYI	5317024107	PEREMPUA	DAMEKA	01-07-1937	MANUKAKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083193	tinggal dalam kel				KERDIL	keluarga			
45	RAMBU BOBU	5317025212	PEREMPUA	KABELAW UNTU	12-12-1933	WAIMAMON	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021806110001	tinggal dalam kel				GANGUAN	keluarga			
46	RAMBU IHU ATA PAGA	5317026012	PEREMPUA	AWANANG	31-12-1936	LAIRIKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020808170004	tinggal dalam kel				TUNA RUN	keluarga			
47	RAMBU RAUNA BELA	5317024107	PEREMPUA	PRAILIANG	01-07-1945	LAIRIKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317023103150020	tinggal dalam kel				STROKE	keluarga			
48	KAHI LEBA	5317024707	PEREMPUA	LAIRIKA	01-07-1963	MANUKAKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083009	tinggal dalam kel				TUNA WIC	keluarga			
49	OKI R. KAITA WOJI	5317024608	PEREMPUA	WAIMAMO NGU	'08-06-1980	WAIMAMON	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083153	tinggal dalam kel				BIBIR SUM	keluarga			
50	AGUSTO TANGKA NGARA LANG	5317022108	LAKI-LAKI	WAIMAMO NGU	21-08-2013	WAIMAMON	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083159	tinggal dalam kel				BISU	keluarga			



51	ZAKARIA UMBU SAGA ANAKAKA	5317022804	LAKI-LAKI	LAIRIKA	28-04-1995	LAIRIKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083217	tinggal dalam kel				KERDIL	keluarga			
52	RAMBU TABA LEKI	5317026606	PEREMPUAN	WAINIROBU	26-06-1976	WAINIROBU	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083272	tinggal dalam kel				GANGUAN	keluarga			
53	YUBLINA L. MBANA	5317027001	PEREMPUAN	KARITA	30-01-1979	WAIRASA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204090005	tinggal dalam kel				TUNA RUN	keluarga			
54	MARKUS TIBU	5317032802	LAKI-LAKI	ANAKALANG	28-02-1968	RESETLEM	tinggal dikeluarga	orang tua	5317022011120002	tinggal dalam kel				STROKE	keluarga			
55	RAMBU SORI ANAWOLI	5317024609	LAKI-LAKI	MALINJAK	25-09-1968	MANUKAKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083034	tinggal dalam kel				TUNA WIC	keluarga			
56	MUKA PALANGA	5317021010	LAKI-LAKI	MALADI	10-10-1963	LAIRIKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083214	tinggal dalam kel				BIBIR SUM	keluarga			
57	NOITA R. GUNA	5317024406	PEREMPUAN	ANAMANU	04-06-1977	LOKU UJUN	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204083323	tinggal dalam kel				BISU	keluarga			
58	ASNI R. LAWU NEDI	5317025411	PEREMPUAN	GALU MATABA	14-11-2002	LAIRIKA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020704150006	tinggal dalam kel				BISU	keluarga			
59	DASA LALU PADA	5317024604	L	DASA ELU	06/03/1963	KAPALAS	tinggal dikeluarga	orang tua	5317022504090008	tinggal dalam kel				LUMPUH	keluarga			
60	KORNELIS KURI KAKA	5317021506	L	MANU PAIWO	15/06/1962	PRAIKAWIL	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021609100012	tinggal dalam kel				KUSTA	keluarga			
61	TIMOTIUS MAWU ADUNG	5317025107	L	MANU PAIWO	11/07/1973	PRAIKAWIL	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021609100012	tinggal dalam kel				KUSTA	keluarga			
62	LIDYA JOLA PEDE	5317025407	P	DASA ELU	14/07/1963	REMAJA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021006090004	tinggal dalam kel				GILA	keluarga			
63	ERLANDUS MALI NGARA	5317020107	L	DASA ELU	01/07/1965	KAPALAS	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021011140001	tinggal dalam kel				BISU TULI	keluarga			
64	AGUS KOGA PAWOLUNG	5317025707	L	PRAIMARADA	07/07/1964	KAPALAS	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021011140001	tinggal dalam kel				BISU TULI	keluarga			
65	BENGE LALA	5317025012	P	DASA ELU	20/12/1962	TUNAS HAR	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204080747	tinggal dalam kel				GILA	keluarga			
66	LIDIA LEDA KAKA	5317027112	P	DASA ELU	31/12/1966	KAPALAS	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204080746	tinggal dalam kel				LUMPUH, B	keluarga			
67	PEDA JORU	5317024107	P	KAHOHURARA	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082810	tinggal dalam kel				LUMPUH	keluarga			
68	HULA WOHANGARA	5317022902	L	KAHOHURARA	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082912	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
69	BITA DOPI	5317026910	P	KAHOHURARA	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082912	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
70	DELU WONG	5317020107	L	GALU LITANG	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082940	tinggal dalam kel				PINCANG	keluarga			



71	YULIUS UK MERANG	5317020909	L	WACU PALOLU	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082952	tinggal dalam kel				TULI	keluarga			
72	ANGGI KAITA RIWA	5317024706	P	DERI	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082926	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
73	DOTUR U. M. SABAKODI	5317020608	L	PANDANGI	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082853	tinggal dalam kel				BISU	keluarga			
74	ARYANTO U.KEBU DALA	5317022308	L	TAUWA	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020409170001	tinggal dalam kel				POLIO	keluarga			
75	ALIA R.KARAJI DAWI NGANA	5317024312	P	TAUWA	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020409170001	tinggal dalam kel				POLIO	keluarga			
76	ALVIAN T.D.RAKA	5317023110	L	PALENDI	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317022901140000	tinggal dalam kel				TULI	keluarga			
77	YULIUS R.NGALA DETA	5317020112	L	PREKANIR U	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082801	tinggal dalam kel				TULI	keluarga			
78	MARIA R.D.TEDA	5317025303	P	TAMATERA	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082658	tinggal dalam kel				BISU/IDIOT	keluarga			
79	EFANI PUTRI TARA DIMA	5317026211	P	PAUKAWO WUR	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082610	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
80	PILA MALIYANI	5317020107	L	KARARA	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317022805150005	tinggal dalam kel				PINCANG/	keluarga			
81	ARIANCE K. HARA	5317026201	P	PODA	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082651	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
82	MARIA GORETI R.ATA HAWU	5317027004	P	GALUDERI	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021310080004	tinggal dalam kel				BUTA/LUM	keluarga			
83	RAMBU LI LAWAJATI	5317025707	P	PRERITA	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021902140002	tinggal dalam kel				PINCANG	keluarga			
84	ALDI U.R.KOHI	5317020104	L	ANTABOLU	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082590	tinggal dalam kel				TUL/BISU	keluarga			
85	FRANS UMBU DATTA	5317020908	L	WAWINU	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082660	tinggal dalam kel				PINCANG	keluarga			
86	YURI RAMBU LADU	5317026707	P	WAWINU	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020608090003	tinggal dalam kel				GILA	keluarga			
87	RAIN HINA MARI MATA	5317021907	L	PALENDI	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082729	tinggal dalam kel				AYAN	keluarga			
88	KABEBA R. HANA	5317025610	P	WACU PALOLU	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082952	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
89	ILKA LADU BANA	5317021312	P	PALENDI	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082730	tinggal dalam kel				IDIOT	keluarga			
90	LUBA LENA	5317024107	P	HARANGI	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317021211110001	tinggal dalam kel				PICANG	keluarga			



91	R. BOBA LAPUR	5317024912	P	GALUDERI	#####	KAMBAJAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082641	tinggal dalam kel			AYAN	keluarga			
92	KORA SAPU LARUNG	5317021212	L	PREKOPA	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317023003120008	tinggal dalam kel			AYAN	keluarga			
93	ANDERIAS K. PUNDAR	5317023003	L	PANDANGI	#####	AWANANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082850	tinggal dalam kel			BISU	keluarga			
94	KARERI HARA	5317024107	P	POLUMAN U	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082750	tinggal dalam kel			TULI	keluarga			
95	DAVID DAMU LODU	5317020107	L	PAHOMBA	#####	TOMBURAF	tinggal dikeluarga	orang tua	5317020204082749	tinggal dalam kel			TULI	keluarga			
96	MARIA ANGGRENI SABA TUDUN	5317055805	PEREMPUA	PANGADU	18/05/2014	PAGADU,R	tinggal dikeluarga	orang tua	5317055805140001	tinggal dalam kel			CACAT TANGAN				
97	LUDGERUS UMBU BOTU PADA	5317051710	LAKI-LAKI	KABATA MALISI	27/02/1992	PAGADU,R	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051710920001	tinggal dalam kel			CACAT KAKI,TANGAN				
98	MARIA ROSARI TAMU INA	5317055705	LAKI-LAKI	PANGADU	17/05/2003	PAGADU,R	tinggal dikeluarga	orang tua	5317055705030002	tinggal dalam kel			CACAT MENTAL				
99	KALEDI WAWU	5317051011	LAKI-LAKI	RUGU WATU	10/11/1943	RUGU WAT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051011431001	tinggal dalam kel			CACAT KAKI				
100	IMA HARA KUDU	5317014601	PEREMPUA	RUGU WATU	06/01/1996	RUGU WAT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317014601960001	tinggal dalam kel			BISU,TULI				
101	DINA BORA	5317054107	LAKI-LAKI	WAWINU	01/07/1977	WAWINU,R	tinggal dikeluarga	orang tua	5317054107770004	tinggal dalam kel			BISU,TULI				
102	KATRINA JOLA UTANG	5317054609	PEREMPUA	KABATA MALISI	06/09/1951	RUGU WAT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317054609510001	tinggal dalam kel			CACAT TANGAN				
103	RINA KASI BUSA	5317054607	PEREMPUA	KABATA MALISI	15/04/1970	WATUDEDI	tinggal dikeluarga	orang tua	5317054607700002	tinggal dalam kel			CACAT MENTAL				
104	PENISIUS SIWA JURUMANA	5317052101	LAKI-LAKI	WATUDEDI	21/01/2000	WATUDEDI	tinggal dikeluarga	orang tua	5317052101000001	tinggal dalam kel			CACAT MENTAL				
105	LAISU PEKA	5317050107	LAKI-LAKI	PRAI KAJAPI	01/07/1948	LAI EPA,RT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317050107480001	tinggal dalam kel			CACAT FISIK				
106	JIJA KADI WANU	5317050107	LAKI-LAKI	WAIKAJOB AK	01/07/1962	LAI MAPIDU	tinggal dikeluarga	orang tua	5317050107620006	tinggal dalam kel			CACAT MENTAL				
107	REKU SADA MESA	5317011706	LAKI-LAKI	PRAI MAYELA	17/06/1972	PRAI MAYE	tinggal dikeluarga	orang tua	5317011706720006	tinggal dalam kel			BISU,TULI				
108	JUWA MERU	5317055704	PEREMPUA	PRAI RAMI	17/04/1961	LAIKABOBU	tinggal dikeluarga	orang tua	5317055704800002	tinggal dalam kel			CACAT FISIK				
109	YULIANA PARI GUSI	5317054107	PEREMPUA	PRAI KAJAILU	10/07/1947	KARAKI,RT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317054107470005	tinggal dalam kel			CACAT FISIK				
110	ARIANTO M. META	5317051803	LAKI-LAKI	WAINILEK U	18/03/2011	WAINILEKU	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051803110001	tinggal dalam kel			BIBIR SUMBING				



111	YOHANES NG BEKU	5317051604	LAKI-LAKI	PRAI TERA	16/04/2004	PRAI TERA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051604040002	tinggal dalam kel				BISU,TULI				
112	ERNIAWATI RAMBU RAUNA EDI	5317056601	PEREMPUAN	PRAI RAMI	26/01/1992	PRAI RAMI	tinggal dikeluarga	orang tua	5317056601920002	tinggal dalam kel				CACAT MENTAL				
113	FRISOLHA CHRISNA PARI GUSI	5317055012	PEREMPUAN	MALINJAK	10/12/2016	POGUMAW	tinggal dikeluarga	orang tua	5317055012160001	tinggal dalam kel				BISU,TULI				
114	ANASTASIA P. WASAK	5317056003	PEREMPUAN	PRAI KAJAILU	20/03/2012	KARAKI,RT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317056003120001	tinggal dalam kel				CACAT MULUT				
115	CANDRA U.S. JURUMANA	5317051309	LAKI-LAKI	WAIMANU	13/09/2008	WAIMANU,RT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051309080001	tinggal dalam kel				BISU,TULI				
116	ERNI TABA LEKI	5317056011	PEREMPUAN	PRAI KOMUS	20/11/1974	PALEDI,RT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317056011740001	tinggal dalam kel				BUTA SEBELAH				
117	SORI SUATU	5317015403	PEREMPUAN	TANA LODU	14/03/1955	KABATA BIL	tinggal dikeluarga	orang tua	5317015403550001	tinggal dalam kel				TUNA NETRA				
118	EKA UMBU SAINGU DETA	5317051012	LAKI-LAKI	KALEBU SUAKA	10/12/1997	LAI PATANG	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051012970002	tinggal dalam kel								
119	DORKAS DULU MOSA	5317015307	PEREMPUAN	PRAI TERA	13/07/1960	KADONGA	tinggal dikeluarga	orang tua	5317015307600001	tinggal dalam kel				CACAT FISIK				
120	PUTRI R. LIKA DUPA	5317054812	PEREMPUAN	LAIMERAN G	08/12/2006	PUNGI KAP	tinggal dikeluarga	orang tua	5317054812060001	tinggal dalam kel				CACAT KAKI				
121	DANIAL DAWA LOWU	5317052102	LAKI-LAKI	PUNGI KAPULUT	21/12/2009	PUNGI KAP	tinggal dikeluarga	orang tua	5317052102090001	tinggal dalam kel				CACAT KAKI				
122	ENGKI K. KABUKU	5317050911	LAKI-LAKI	PRAI RAMI	09/11/2002	PUNGI KIH	tinggal dikeluarga	orang tua	5317050911020001	tinggal dalam kel				BISU,TULI,CACAT MENTAL				
123	LUTGARDUS KALUNGA DIKI	5317014107	PEREMPUAN	PRAI KAJAPI	26/10/1972	PRAI KAJAP	tinggal dikeluarga	orang tua	5317014107730024	tinggal dalam kel				CACAT MENTAL				
124	PADA BIDA MESA	5317011306	LAKI-LAKI	LAIKABOB U	13/06/1950	LAIKABOB	tinggal dikeluarga	orang tua	5317011306590001	tinggal dalam kel				CACAT FISIK				
125	MIKAIL KADUBU B. WALI	5317010107	LAKI-LAKI	PRAI RAMI	01/07/1947	PRAI RAMI	tinggal dikeluarga	orang tua	5317010107470026	tinggal dalam kel				TUNA RUNGU				
126	LIBERTA HARA KUDU	5317014107	PEREMPUAN	PRAITERA	01/07/1945	PRAI RAMI	tinggal dikeluarga	orang tua	5317014107490016	tinggal dalam kel				CACAT KAKI				
127	ARIF KALIMANDANG	5317051004	LAKI-LAKI	POGUWAT U	10/04/2017	POGU WAT	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051004170001	tinggal dalam kel				LUMPUH				
128	PAULINA PODU BARA	5317014107	PEREMPUAN	LAITODA	01/07/1952	LAITODA D	tinggal dikeluarga	orang tua	5317014107430006	tinggal dalam kel				Kaki Kanan Pincang				
129	Minggus Kaledi Demu	5317052809	Pria	Kajilukobu	28-09-1986	Kajilukobu	tinggal dikeluarga	orang tua	5317052809800001	tinggal dalam kel				Tangan strok				
130	Jhon Lapu Pagegi	5317051506	Pria	Waikajobak	15-06-1987	Waikajobak	tinggal dikeluarga	orang tua	5317051506870001	tinggal dalam kel				Kaki Pincang				



FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS) KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	KABUPATE N/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANG AN PENGEMIS	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay	Padiratana	12		6	11	1	182	152		
			Tanambanas Selatan	6		-	7	-		40		
2		Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	9	6	3	7			102		
			anajiaka							90		
			anapallu							34		
3		Mamboro	Cendana Barat							11		
			manuwolu							92		
			ole ate							96		
4		KTS	Konda maloba							76		
			Malinjak							111		
			manurara							76		
			Waimanu	32								
			Wailawa	8		5	16	5				
			Dasa elu	7	4		3					
5		KTK	Kabela Wuntu	7	1	10	2					
			Makatakeri	6		6	2					
			Umbu riri	4								
6		Mamboro										



FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABA/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sumba Tengah							2				14				
	Total															



FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SUMBA TENGAH

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA												KONDISI SARANA			TINGKAT		
		SHELTER/ RUMAH SINGGA	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKODAN	KSB	TRCBENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga 2347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga 2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga 5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total sarana prasarana yang ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah sarana prasarana																		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																			
1	Estimasi jumlah korban																		
	Total sarpras yang ada																		
	Jumlah sarpras yang																		



- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Belum dilaksanakan tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Belum dilaksanakan tahapan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Belum dilaksanakan tahapan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.



BAB III
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Bidang Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah:

- 1. Pendidikan anak usia dini (peserta didik yang berusia 5-6 tahun);
- 2. Pendidikan dasar (peserta didik yang berusia 7-15 tahun); dan
- 3. Pendidikan kesetaraan (peserta didik yang berusia 7-18 tahun).

1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2024
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari dua tahun sebelumnya	2024
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	2024

1.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pererapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. APBD : Rp. 44,861,055,522

Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	8,063,415,528	7,744,572,824	96,05%
2.	Pendidikan Dasar	36,453,739,994	35,357,570,864	96,99%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Pendidikan Kesetaraan	343,900,000	153,711,6000	44,70%
Jumlah Total		44,861,055,522	43,255,855,288	96.42 %

- b. APBN : -
- c. Sumber Dana Lain yang Sah : -

1.4. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengawas Sekolah	Guru SD	Guru SMP	Tenaga Non Guru SD	Tenaga Non Guru SMP
55	12	568	550	239	137

1.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	100%	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	100%	2024
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	2024

- Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD sebanyak 3.652 anak dari jumlah anak usia 5-6 tahun sebanyak 3.652 anak.
- Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebanyak 16.010 anak dari jumlah anak usia 7-15 tahun sebanyak 16.010 anak.



- Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan sebanyak 223 anak dari jumlah anak usia 7-18 tahun sebanyak 223 anak.

1.6. Kendala, Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal yang dilakukan adalah melalui pendataan dengan menyebarkan instrumen beserta petunjuk pengisiannya kepada sekolah, merupakan hal baru bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah, yaitu melakukan pendataan SPM secara langsung kepada semua SD dan SMP baik negeri maupun swasta, sehingga didapati kendala pada saat pengisian instrumen, baik oleh Dinas, Pengawas dan Sekolah belum secara maksimal dilaksanakan.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui bimtek kepada kepala sekolah dan operator sekolah tentang cara pengisian instrumen, selain itu juga dilakukan pendampingan bagi pengawas Sekolah untuk pengukuran indikator pencapaian SPM hal ini dimaksud agar pengawas dapat memverifikasi instrumen yang sudah diisi oleh sekolah binaanya. Langkah selanjutnya yang dilakukan ditingkat Dinas, data tersebut diverifikasi kembali dengan melibatkan beberapa Operator Sekolah sebelum dijadikan data final untuk pengukuran penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumba Tengah.



2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4. Pelayanan kesehatan balita;
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penerapan dan pencapaian SPM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan	100%	2024



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		kesehatan		
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	2024
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024

2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. APBD : Rp. 4.861.301.720

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	879.509.000	733.731.000	83,43%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	750.802.000	703.362.000	93,68%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	361.699.320	313.907.000	86,79%
4.	Pelayanan kesehatan balita	802.915.000	686.136.300	85,46%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	432.130.000	402.772.000	93,21%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	588.436.000	480.006.000	81,57%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	196.452.000	181.306.000	92,29%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	98.928.000	91.868.000	92,86%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	234.380.000	230.851.000	98,49%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	35.400.000	31.680.000	89,49%



11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	419.850.400	398.468.000	94,91%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	60.800.000	50.630.000	83,27%
Jumlah Total		4.861.301.720	4.304.717.300	88,55%

- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

2.4. Dukungan Personil

Personil yang tersedia untuk menunjang penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
4.	Pelayanan kesehatan balita	489 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	552 orang	Dokter 25 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	489 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga



No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	Keterangan
			Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	302 Orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	400 Orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Ahli Teknik Laboratorium Medik 36 Orang, Radiografer 1 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	551 Orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Ahli Teknik Laboratorium Medik 36 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang

2.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	76,76%	2024
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	100%	77,61%	2024
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	100%	79,76%	2024
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	100%	86,93%	2024
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	90,38%	2024
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	63,12%	2024
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	100%	81,04%	2024
8.	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi	100%	90,82%	2024



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
	penderita hipertensi	yang mendapat layanan kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan kesehatan	100%	93,86%	2024
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	119,44%	2024
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan	100%	80,73%	2024
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan	100%	77,77%	2024

- Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.645 orang dari jumlah ibu hamil sebanyak 2.136 orang;
- Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.922 orang dari jumlah ibu bersalin sebanyak 2.090 orang;
- Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.888 orang dari jumlah bayi baru lahir sebanyak 1.991 orang;
- Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 7.742 orang dari jumlah balita sebanyak 8.906 orang;
- Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 15.029 orang dari jumlah warga negara usia Pendidikan dasar sebanyak 16.628 orang;
- Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 43.379 orang dari jumlah warga negara usia produktif sebanyak 52.722 orang;
- Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 5.568 orang dari jumlah Warga Negara usia lanjut sebanyak 6.871 orang;
- Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 11.777 orang dari Jumlah Warga Negara penderita hipertensi sebanyak 12.967 orang;



- Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 275 orang dari Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus sebanyak 293 orang;
- Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan sebanyak 86 orang dari Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat sebanyak 72 orang;
- Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.378 orang dari Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi sebanyak 1.707 orang;
- Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.397 orang dari Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sebanyak 1.745 orang.

2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi anggaran masih lebih banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Belum semua Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dibutuhkan untuk pelayanan dasar tersedia sesuai kebutuhan, baik jumlah, jenis dan penyebarannya;
3. Belum semua sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) yang dibutuhkan untuk pelayanan dasar tersedia sesuai kebutuhan, baik jumlah, jenis dan penyebarannya;
4. Kualitas perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal.

b. Solusi:

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan SDM Kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan SPA;
4. Meningkatkan kualitas atau efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar di bidang kesehatan.



3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)**

3.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari;
- 2. Penyediaan pelayanan Pengelohan Air Limbah domestik.

3.2. **Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	2024
2.	Penyediaan pelayanan Pengelohan air Limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domsetik	100%	2024

3.3. **Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah adalah sebagai berikut:

- a. APBD : Rp. 27,471,460,107

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp. 18,062,757,940	Rp. 17,937,338,612 atau 99,31%
2	Penyediaan pelayanan air limbah domestik	Rp. 9,408,702,167	Rp. 9,139,140,830 atau 97.13 %
Jumlah Total		Rp. 27,471,460,107	Rp. 27,076,479,442 atau 98,56%

- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

3.4. **Dukungan Personil**

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari memiliki dukungan personil sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 orang PNS dan 1 orang tenaga non ASN;
- b. Penyediaan air limbah pengolahan domestik memilki dukungan personil sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 orang PNS, 4 orang Non PNS dari DAK.



3.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	61,03%	2024
2.	Penyediaan pelayanan Pengelohan air Limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domestik	100%	67,74%	2024

- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari–hari sebanyak 51.801 jiwa dari Jumlah warga negara yang harus memperoleh kebutuhan pokok air minum sebanyak 84.884 jiwa;
- Jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domestik sebanyak 43.440 Kepala Keluarga dari Jumlah Kepala Keluarga yang harus memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domestik sebanyak 64.128 Kepala Keluarga.

3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam necapai taget dari SP mini adalah sebagai berikut:

1. SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/SKPD lain sebagai mitra kerja yaitu antara lain Bappelitangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPBD sehingga pencapaian beberapa SPM sulit tercapai karena kurangnya koordinasi;
2. Kurangnya fasilitas dan utilitas yang mendukung tercapainya SPM;
3. Kurangnya dukungan dana untuk mencapai target dari SPM.

b. Solusi:

1. Menambah fasilitas dan utilitas yang mendukung demi tercapainya target SPM;
2. Menambah dukungan dana untuk mencapai target SPM.



4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR)**

4.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

4.2. **Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	2024

4.3. **Alokasi Anggaran**

- a. APBD : -
- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

4.4. **Dukungan Personil**

SDM yang tersedia pada urusan perumahan rakyat yaitu 7 orang PNS.

4.5. **Hasil Capaian**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	0%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	0%	0%	2024



	masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
--	---	--	--	--	--

- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebanyak 0;
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni sebanyak 0 Unit dari Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni sebanyak 0 Unit.

4.6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/SKPD lain sebagai mitra kerja yaitu antara lain Bappelitangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPBD sehingga pencapaian beberapa SPM sulit tercapai karena kurangnya koordinasi;
 - 2) Kurangnya fasilitas dan utilitas yang mendukung tercapainya SPM;
 - 3) Kurangnya dukungan anggaran untuk mencapai target dari SPM.
- b. Solusi
 - 1) Menambah fasilitas dan utilitas yang mendukung demi tercapainya target SPM;
 - 2) Menambah dukungan anggaran untuk mencapai target SPM.



5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**

5.1. **Jenis pelayanan dasar**

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah pelayan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

5.2. **Target pencapaian SPM oleh Daerah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	2024
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	2024

5.3. Alokasi anggaran

- a. APBD : 3.368.789.760
- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

5.4. Dukungan Personil

Dukungan personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sampai dengan Bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Kepala Satuan	Pembina Utama Muda /IVc	ASN	1
2	Sekretaris	Pembina Tk.I/IV-b	ASN	-
3	Kepala Bidang	Pembina/Iva	ASN	2
4		Penata Tk.I III/d	ASN	2
5	Kepala Seksi	Penata Tk.I III/d	ASN	4
6		Penata III/c	ASN	4
7	Kelompok Fungsional	Penata Tk.I III/d	ASN	3
8	Staf	Penata Muda III/a	ASN	1
9	Staf	Pengatur Tk.I-II/d	ASN	2
10	Staf	Pengatur II/c	ASN	2
11	Staf	II/b	ASN	1

NO	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Banpol	Non ASN	51
2	Sopir	Non ASN	3
3	Tenaga Administrasi/Operator Komputer	Non ASN	2
4	Pramusaji	Non ASN	2



5.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%	2024
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	91,65%	2024
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	2024

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota sebanyak 50 dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 50;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 250 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 250 orang;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 250 orang;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 1 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 1 orang;



- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran sebanyak 80 dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 80.

5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung;
- Kurangnya BIMTEK/DIKLAT dalam rangka peningkatan kompetensi personil SatpolPP terkait tupoksi;
- Belum maksimalnya koordinasi antara OPD terkait.

b. Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas :

- Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
- Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan OPD terkait.



6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0%	2024
5	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah	Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota	100%	2024



	Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	yang memperoleh perlindungan dan jami nan sosial		
--	---	--	--	--

6.3. Alokasi Anggaran

- a. APBD : -
- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

6.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 20 orang
- b. Non-PNS = 19 orang

Nomor	Golongan	Eselon			Staf	Keadaan per 31 Desember 2024 (orang)
		II	III	IV		
1.	IV	1	1	-		2
2.	III		3	9	3	15
3.	II	-	-	-	3	3
4.	Kontrak				19	19
Total						39

6.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	100%	2024



	sosial	sosial diluar panti			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0%	0%	2024
5	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jami nan sosial	100%	100%	2024

- Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 62 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 62 orang;
- Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 219 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 219 orang;
- Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 25 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 25 orang;
- Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 0;
- Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang mendapat pelayanan sebanyak 18 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 18 orang.

6.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
 2. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
 3. Kondisi Geografis Sumba Tengah yang mempengaruhi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 4. Minimnya dana dalam melakukan pendataan bagi PMKS;



5. Ketersediaan sumber Daya Manusia masih sangat kurang dalam mencukupi kebutuhan dalam mendukung program/kegiatan yang ada;
 6. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang Sosial bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Solusi
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
 2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
 4. Dukungan dari Pemerintah Daerah berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah yang memberikan ruang gerak kepada Dinas Sosial untuk lebih kreatif, inovatif dalam upaya memberikan pelayanan sosial pada masyarakat;
 5. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perbantuan dan dana dekonsentrasi, membantu mengatasi masalah namun belum optimal;
 6. Menambah dukungan dana untuk mencapai target dari SPM.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan, yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

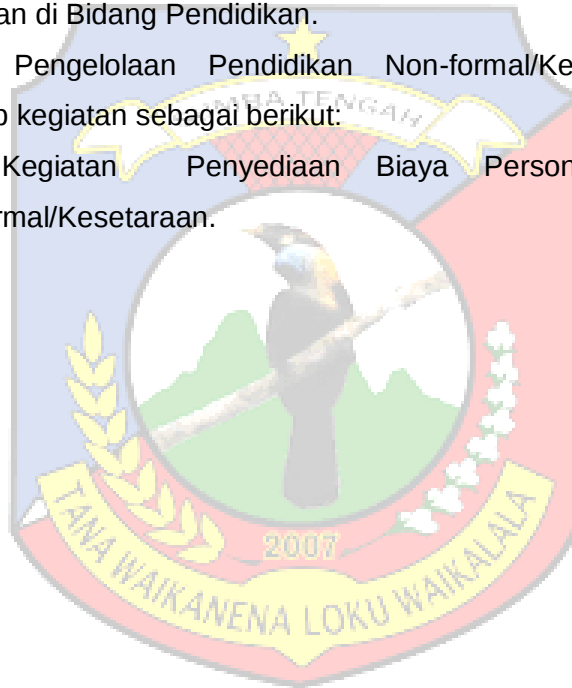
1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha;
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - c. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar;
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - h. Sub Kegiatan Pembangunan laboratorium sekolah dasar;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK.
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
 - d. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium;
 - e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - f. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
 - g. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - h. Sub kegiatan pengadaan mebel sekolah;
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - l. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
 - m. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
 - n. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi



Layanan di Bidang Pendidikan.

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
 - e. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
 - f. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PUAD;
 - h. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan;
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.



2. Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - l. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:**

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan.

b. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:**

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman.



4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Tahun Anggaran 2024 tidak alokasi anggaran untuk penyelenggaraan SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

b. Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdiri dari:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



6. **Urusan Sosial**

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak ada alokasi anggaran untuk pemenuhan layanan dasar pada urusan sosial karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.



BAB V PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan SPM. Namun perlu disadari bahwa keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, yang mengacu pada batas waktu Nasional.

Beberapa hal yang harus di perhatikan oleh setiap Perangkat Daerah agar SPM dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud;
2. Menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan Menteri;
3. Rencana pencapaian SPM tersebut perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah;
4. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, kebijakan umum anggaran;
5. Rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Penyusunan SPM Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun mendatang.

Waibakul, 21 Maret 2025


BUPATI SUMBA TENGAH,
PAULUS S.K. LIMU